

MODALITAS DALAM KONTESTASI POLITIK

**(Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny
Sondakh dan Maximiliaan Lomban pada Pemilukada
di Kota Bitung Sulawesi Utara tahun 2010)**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Ilmu Politik
pada Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro**

Disusun oleh:

Stella Maria Ignasia Pantouw

NIM. 14010110400017

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2012**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan suatu tahapan atau proses yang digunakan dalam suatu negara seperti Indonesia. Sesungguhnya nilai-nilai demokrasi bukanlah suatu nilai yang asing dalam budaya Indonesia, sejak masa lampau nilai-nilai ini telah ada dalam sejarah bangsa kita. Demokrasi berlandaskan pada nilai kebebasan manusia. Demokrasi juga mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-tingginya pada kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum nilai demokrasi merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pemilukada saat ini merupakan agenda penting dalam setiap daerah, bahkan menjadi agenda yang di tunggu- tunggu oleh setiap warga negara yang ada. Reformasi tahun 1998 merupakan suatu momentum untuk merubah tatanan kehidupan kebangsaan, dengan membuka kebebasan pada setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Dengan adanya reformasi tersebut berdampak pada perubahan mekanisme Pemilu dari sistem perwakilan ke sistem langsung yang diperjelas dalam Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan mekanisme pemilukada tersebut telah membuka ruang kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik tersebut tidak hanya berjalan dalam bentuk

pemberian hak suara, melainkan adanya antusiasme warga yang mendaftarkan diri sebagai kontestan di pilukada.

Jika mencermati prosedur maupun proses pemilihan di dalam pilukada secara langsung, secara metafora kita bisa menggambarkan bahwa kontestasi itu ibarat balapan mobil. Pasangan calon kepala daerah itu berkemungkinan memenangkan pilukada secara langsung manakalah memiliki tiga kombinasi di dalam berkendara, yakni adanya mobil yang baik, sopir yang piawai, dan bensin yang memadai. Secara konseptual metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon yang akan mengikuti kontestasi dalam pilukada. Ketiga modal itu adalah modal politik (*political capital*), modal sosial, (*social capital*) dan modal ekonomi (*economical capital*), ketiga modal ini dapat mempengaruhi seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh¹.

Pelukada merupakan arena kontestasi politik dengan kompetisi antar pasangan kandidat dan pemenangan ditentukan suara terbanyak oleh pemilih. Kompetisi yang terjadi dipengaruhi oleh kapasitas figur masing-masing pasangan calon kandidat artinya meskipun aturan pencalonan minimal 15 % kursi atau suara hasil legislatif.² Tetapi kompetisi yang terjadi bukan persaingan antar partai

¹Marijan Kacung, 2006, Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung, Pustaka Eureka, Surabaya, Hal 89

²Ketentuan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 59 ayat 2 UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa "partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15 % dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD".

namun yang lebih menonjol yaitu figur kandidat tersebut seperti ketokohan, popularitas dan moralitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Hal ini dapat menjadi sangat penting dalam suatu kontestasi, dimana seseorang hanya dengan mengandalkan popularitas dan figur mampu bersaing dalam pemilukada. Modal ini adalah bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya.

Modalitas dalam kontestasi politik selain peran figur/modalitas kandidat, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi. Dalam kontestasi pemilukada, dana politik juga pasti sangat menentukan strategi pemenangan yang dijalankan oleh kandidat dan tim. Modalitas ekonomi sangat diperlukan untuk membiayai semua tahap-tahap pemilukada oleh kandidat dan tim pemenangan. Selain itu juga peran modal politik menunjukkan bahwa dari fungsi partai juga tidak terlepas sebagai pintu masuk bagi calon terutama bukan kader partai dan sementara itu partai-partai yang ada boleh jadi telah gagal menemukan figur-figur yang dianggap mampu bersaing terutama berkaitan dengan dukungan politik dan dana politik.

Namun, hal yang perlu diperhatikan parpol, menurut Sahdan dan Haboddin, bahwa kandidat yang dicalonkan oleh partai (koalisi partai), dimana dalam melakukan rekrutmen kandidat, partai hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek antara lain ; kualitas kandidat, popularitas kandidat, kompetensi kandidat, kapabilitas kandidat, termasuk di dalamnya adalah moralitas kandidat

yang diusung oleh partai politik³. Mencermati beberapa aspek di atas, maka demokrasi prosedural melalui cara pemilukada dengan memilih orang menempatkan figur sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan calon kepala daerah oleh pemilih. Dengan kata lain bahwa modalitas pun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena saling berkaitan satu sama lain.

Sebagaimana halnya daerah lain di Indonesia, Sulawesi Utara juga telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ditingkat provinsi maupun disejumlah wilayah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) oleh Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bitung, menetapkan Pemungutan Suara pada hari Kamis tanggal 9 bulan Desember tahun 2010⁴. Pemilihan Umum ini diikuti 4 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota :

1. Robert Kontantinus Lahindo, SH, M.Si & Ir. Meiti Kolang,
2. Edison Tatulus, SAB, MAP & Fientje Saerang, Sm.E,
3. Drs. Ramoy Markus Luntungan & Yondris Everson Kansil,
4. Hanny Sondakh & Maximilliaan Jonas Lomban, SE. Msi.

Arena kontestasi pemilukada di Kota Bitung terdapat pasangan yang menjadi perhatian dimana adanya sirkulasi elit dari pasangan dan dukungan koalisi partai. Sirkulasi elit/figur dan dukungan partai politik memang terjadi pada pemilukada tahun 2010 namun meskipun prosentase berbeda melihat besarnya dukungan pasangan kandidat tersebut termasuk calon kandidat lainnya

³ Lihat Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin (editor), 2009, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia*, IPD, Yogyakarta. hal. 86

⁴ Lihat Keputusan KPU Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 Tentang Penetapan Hari, Tanggal Dan Bulan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota, Kota Bitung Tahun 2010.

yang dicalonkan oleh gabungan partai politik, peran modalitas figur/kandidat lebih utama dan menjadi fokus oleh pemilih dibandingkan melihat partai yang mencalonkan pasangan kandidat tersebut. Perolehan suara yang sangat signifikan terlihat begitu jelas dalam pemilukada Kota Bitung, dimana pasangan Hanny Sondakh dan Maximiliaan Lomban (SOLO) didukung oleh partai PKPI berada di urutan pertama memperoleh suara terbanyak yaitu 51.548 suara (53,50 %), selanjutnya Ramoy M. Luntungan dan Youndris E. Kansil (RML-YK) didukung partai PDIP pada urutan kedua sebanyak 33.461 suara (34,70 %), disusul Robert K. Lahindo dan Meyti Korang (RKL-ML) 8.768 suara (9 %) didukung oleh parti GOLKAR pada urutan ketiga dan pasangan yang maju sebagai calon Independent Edison Tatulus dan Fintje Saerang (ET-FS) menempati urutan terakhir dengan perolehan suara 2.583 (2,60 %)⁵.

Kemenangan pasangan Hanny Sondakh dan Maximilliaan Lomban dalam pemilukada ini tidak semata-mata diperoleh melalui “jalan pintas” tapi untuk mencapai kemenangan ini memerlukan pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat yang memilih. Hal ini menunjukkan bahwa ketokohan/popularitas seorang figur/kandidat sangat mempengaruhi tingkat dukungan masyarakat, apalagi jika figur/kandidat tersebut merupakan orang yang terpandang/bersahaja serta telah memiliki kepercayaan oleh masyarakat.

⁵<http://beritamanado.com/kota-bitung-2/pleno-kpu-bitung-sondakh-lomban-5350-persen/18996/>, download tanggal 13 november 2011, pukul 20.30 wib.

Menarik untuk mencermati figur Hanny Sondakh yang memperoleh suara maksimal dalam Pemilihan Kota Bitung. Berlatar belakang pengusaha, Hanny sangat berbeda dengan kandidat lainnya yang memiliki latar belakang birokrat dan elite politik yang cukup terkenal di Kota Bitung. Modal sosial yang dimiliki oleh figur Hanny Sondakh menjadi titik sentral dari kemenangan dalam kontestasi Pemilihan, dimana Hanny atau dalam panggilan akrabnya sebagai Ko Hanny oleh masyarakat, memiliki sifat kerendahan hati dan kedermawannya yang nyata terhadap masyarakat. Jauh sebelum pemilihan digulirkan, Hanny memang sudah dikenal oleh masyarakat Kota Bitung pada umumnya.

Hanny orang yang sangat sederhana dalam kehidupannya. Ia merupakan orang yang tingkat sosialisasinya cukup tinggi dengan masyarakat, apalagi terhadap masyarakat bawah, walaupun dalam kelas sosial masyarakat Ko Hanny menduduki kelas teratas. Modal inilah yang dimiliki oleh Hanny Sondakh sehingga sejak dulu sebelum pemilihan dilaksanakan, Ia telah mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat, tentu saja hal ini sangat membantu dalam kemenangan pemilihan.

Di dalam pemilihan, modal sosial memiliki makna yang sangat penting bahkan tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal yang lain. Memiliki modal sosial yang tinggi, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih. Lebih dari itu, melalui pengenalan-pengenalan itu, lebih-lebih pengenalan secara fisik dan sosial secara dekat, para pemilih bisa melakukan penilaian apakah pasangan yang ada itu layak untuk dipilih atau tidak. Manakalah seorang calon

dikatakan memiliki modal sosial, berarti calon itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat melainkan juga diberi kepercayaan.

Selain modal sosial, dalam kontestasi politik termasuk pemilukada secara langsung jelas membutuhkan biaya (modal capital/ekonomi). Modal yang besar itu tidak hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan kampanye, yang tidak kalah pentingnya membangun relasi dengan para (calon) pendukungnya, termasuk didalamnya adalah modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya tahapan kampanye. Modal ekonomi memiliki makna penting menjadi “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Di dalam musim kampanye, misalnya membutuhkan uang yang cukup besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster dan spanduk, membayar iklan, menyewa kendaraan untuk mengangkut pendukung, dan berbagai kebutuhan lainnya, termasuk untuk pengamanan. Bahkan, modal ekonomi ini merupakan prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang mencalonkannya. Latar belakang Hanny Sondakh sebagai pengusaha dan etnis tionghoa dapat membantu dirinya mendapatkan dukungan finansial dalam pembiayaan proses pemilukada.

Kemenangan Hanny Sondakh dan Maximilliaan Lomban dalam pemilukada Kota Bitung menciptakan kemenangan dari partai pengusung pasangan ini yaitu PKPI. Menariknya PKPI merupakan partai kecil yang tidak diperhitungkan, tetapi semenjak partai ini dipimpin oleh Hanny Sondakh sebagai Ketua Umum PKPI, partai ini menjadi partai pemenang dalam pemilu legislatif tahun 2009, dan menjadi sorotan partai yang dulunya kecil ini pada pemilukada

Kota Bitung dapat mengalahkan partai-partai besar seperti PDIP dan GOLKAR. Ini menunjukkan bahwa kepopuleran dan ketokohan Hanny Sondakh juga sangat mempengaruhi dinamika partai.

Dari sudut pandang sosial kemasyarakatan, keberadaan masyarakat Kota Bitung berbeda dengan masyarakat di daerah yang lain, yang mana semua masyarakat yang ada ditingkat lokal terfragmentasi ke dalam bingkai kedaerahan yang begitu kental atau dengan kata lain heroism kedaerahan yang berlebihan. Faktanya kebanyakan kepala daerah di Sulawesi Utara adalah orang yang berasal dari daerah tersebut dan sangat jarang ditemui yang bukan putra asli daerah memimpin daerah yang bersangkutan. Contohnya daerah Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Sangihe, dan Kota Tomohon, yang keseluruhan Bupati dan Walikota di daerah-daerah tersebut merupakan putra asli daerah. Sebaliknya yang terjadi di Kota Bitung Kandidat Ramoy Markus Luntungan yang merupakan putra asli daerah Kota Bitung dan merupakan birokrat daerah yang cukup terkenal dan terpendang justru mengalami kekalahan dalam kontestasi pemilukada di Kota Bitung.

Pada etape sebelumnya juga, Milto Kansil yang notabene *incumbent*, menguasai partai PDIP dengan basis masa terbesar, juga berlatar belakang pengusaha terkenal, namun mengalami kekalahan dalam kontestasi pilkada tahun 2005. Tetapi Hanny Sondakh yang bukan merupakan putera asli daerah, berasal dari etnis Tionghoa (cina), golongan agama yang tidak dominan, dapat menjadi pemenang pada pemilukada di Kota Bitung dengan perolehan suara yang sangat signifikan.

Mencermati keberhasilan Hanny Sondakh dalam pemenangan pemilukada Kota Bitung tahun 2010 dengan perolehan suara yang signifikan menarik dielaborasi adalah bagaimana peran modalitas dalam pemenangan pasangan Hanny Sondakh dan Maximillian Lomban pada pemilukada Kota Bitung tahun 2010.

1.2 Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam sebuah pertanyaan besar untuk penelitian ini yaitu “*Bagaimana peran modalitas dalam pemenangan pasangan Hanny Sondakh dan Maximiliaan Lomban dalam Pemilukada di Kota Bitung Tahun 2010?*”

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam kemenangan Hanny Sondakh dan Maxiliaan Lomban pengaruh modal sangat besar. Pada titik ini penulis memilih untuk memfokuskan arah pada modalitas yang dominan dimiliki Hanny Sondakh. Ada beberapa pertimbangan penting yang mendasar, diantaranya: *pertama*; Hanny menjadi sosok sentral yang telah lama dikenal oleh masyarakat kota Bitung, sebagai pengusaha sukses yang merakyat dan baik hati. *Kedua*; Hanny memiliki kekuatan financial (modal capital/ekonomi) yang besar. *Ketiga*; sebagai seorang ketua partai, Hanny juga didukung oleh sumber daya partai yang besar (modal politik).

Sebagai catatan penting bahwa penulis memilih untuk tidak menganalisis faktor wakil dan *incumbent* (walaupun tidak bisa disangkal bahwa faktor tersebut juga berpengaruh) didasarkan pengalaman pilkada di Kota Bitung. Pada pilkada tahun 2005, Hanny berpasangan dengan Robert Lahindo memenangkan pilkada

yang justru mengalahkan *incumbent*. Pada titik ini, dapat diasumsikan bahwa ternyata faktor *incumbent* memiliki pengaruh yang terbatas. Disisi lain pada pemilu pada 2010 Hanny berganti pasangan dengan Maximiliaan Lomban yang notabene bukan putra daerah (berlatar belakang birokrat), juga menang dengan jumlah perolehan suara 53,50 %, asumsinya basis modalalitas yang dimiliki Maximiliaan cenderung kecil jika dibandingkan dengan pasangan sebelumnya (Robert Lahindo) sebagai Ketua Partai.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis menfokuskan analisis pada modalalitas yang dimiliki oleh Hanny Sondakh. Modalitas tersebut dipilah menjadi tiga bagian utama yaitu modal sosial, modal politik dan modal ekonomi (*capital*), yang dapat dirincikan pada pertanyaan-pertanyaan spesifik berikut:

1. Bagaimana kepercayaan (*trust*) dan interaksi sosial yang dibangun oleh Hanny Sondakh dalam hubungannya dengan masyarakat kota Bitung?
2. Jaringan-jaringan apa saja yang mendukung kemenangan Hanny Sondakh?
3. Bagaimana kedudukan Hanny Sondakh sebagai ketua partai PKPI untuk menggerakkan mesin partai dalam kontestasi Pemilu, ?
4. Bagaimana dukungan dana dan kepemilikan alat produksi (perusahaan) dalam kemenangan Hanny Sondakh?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kepercayaan (*trust*) dan interaksi sosial yang dibangun oleh Hanny Sondakh dalam hubungannya dengan masyarakat kota Bitung.

2. Untuk mengetahui jaringan-jaringan apa saja yang mendukung kemenangan Hanny Sondakh pada pemilukada Kota Bitung.
3. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Hanny Sondakh sebagai ketua partai PKPI untuk menggerakkan mesin partai dalam kontestasi pemilukada.
4. Untuk mengetahui bagaimana dukungan dana dan kepemilikan alat produksi (perusahaan) dalam kemenangan Hanny Sondakh pada pemilukada Kota Bitung.

3.2. Manfaat Penelitian

3.2.1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu politik dan sumbangan pemikiran yang bisa bermanfaat bagi studi politik lokal.

3.2.2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dalam tataran yang luas dapat menjadi masukan bagi para aktivis politik dan sebagai inspirasi sehingga memahami bahwa kemenangan yang diraih oleh kandidat dalam pemilukada, tidak bisa diperoleh melalui "jalan pintas" tapi untuk mencapai kemenangan, modalitas yang dimiliki menempati posisi penting. Selain itu juga penelitian ini dapat memberikan sari bagi penelitian-penelitian tentang perkembangan politik khususnya mengenai modalitas dalam proses politik Indonesia pasca reformasi 1998.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Modalitas dalam Kontestasi Politik

Pemilukada merupakan proses demokrasi secara procedural dan substansial dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Didalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi didalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih, tetapi di dalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pemilukada secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda.

Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Menurut Bourdieu (1986), definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materiil maupun simbol, tanpa perbedaan yang

mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu.

Modal harus ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat memiliki arti. Namun, hal itu juga dapat dijelaskan pada tingkat yang lain dengan menggunakan rumusan generatif. Penjelasan seperti ini sedikit bersifat artifisial namun bermanfaat. Keterkaitan antara ranah, habitus, modal bersifat langsung. Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus. Ranah dikitari oleh relasi kekuasaan objektif yang memiliki basis material. Jenis-jenis modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang digabungkan ke dalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis material tersebut.

Modal juga dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya. Yang artinya modal bersifat dapat ditukar. Penukaran paling hebat yang telah dibuat adalah penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang legitimate. Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus dan mempunyai prestise, berarti ia harus diterima sebagai sesuatu yang legitimate. Posisi semacam itu membawa kekuasaan untuk memberi nama (aktivitas, kelompok) kekuasaan mewakili pendapat umum dan utamanya, kekuasaan menciptakan ‘versi dunia sosial yang resmi’.

Dalam abad ke-16 dan 17 istilah “*capital*” digunakan untuk menunjuk kepada, atau (a) stok uang yang akan dipakai untuk membeli komoditi fisik yang kemudian dijual guna memperoleh keuntungan, atau (b) stok komoditi itu sendiri.

Pada waktu itu istilah “stock” dan istilah “capital” sering dipakai secara sinonim. Perusahaan dagang Inggris yang didirikan dalam masa itu atas dasar saham misalnya, dikenal sebagai “*join stock companies*” atau “*capital stock companies*”.

Adam Smith dalam *the wealth of nation* (1776) dikutip Augusto Bunga (2008), Pembedaan ini didasarkan atas kriteria sejauh mana suatu unsur modal itu dalam jangka waktu tertentu hanya terkonsumsi sebagian hanya sebagian (kecil) nilainya menjadi susut, maka unsur itu disebut “*fixed capital*” (misal mesin, bangunan, dan sebagainya). Tetapi jika unsur modal terkonsumsi secara total, maka ia disebut “*circulating capital*” (misal tenaga kerja, bahan mentah dan sarana produksi).⁶

Di dalam proses pilkada sebagai arena kontestasi politik dengan memilih orang dan kompetisi antar kandidat, maka kandidat yang kemungkinan memenangkan pilkada manakala memiliki modalitas terbangun. Modal utama yang harus dimiliki para kandidat yang hendak mengikuti kontestasi didalam pilkada langsung, yaitu modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Pasangan calon kepala daerah itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal, semakin besar pasangan calon yang mampu mengakumulasi tiga modal itu, semakin berpeluang terpilih sebagai kepala daerah. Peluang terpilihnya pasangan kandidat merupakan bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu faktor saja atau modalitas tertentu.

⁶Bunga, Augusto, *Sekilas tentang pengertian modal*, dalam <http://rumahdesainrevolusi.blogspot.com>, download tanggal 29 November 2011, pukul 13.30 wib.

Dalam menetapkan strategi pemenangan pemilukada tidak hanya menyesuaikan kondisi pemilukada itu sendiri dan arena kompetisi tetapi juga termasuk modalitas kandidat baik itu modalitas politik, sosial dan ekonomi. Modalitas saling berkaitan dan sangat menentukan kemenangan, karena itu modalitas yang harus dimiliki kandidat dalam mengikuti kontestasi politik yaitu tidak hanya modal sosial kandidat tetapi juga berupa dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi.

Dalam penelitian ini merupakan fokus pada teori modal politik, modal sosial dan modal ekonomi sehingga memiliki porsi uraian teoritik yang lebih kuat dan mendalam. Modalitas dalam Kontestasi Politik adalah modalitas selain peran figur, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi untuk kemenangan pilkada. Berikut 3 (tiga) modalitas yang harus dimiliki kandidat yang hendak mengikuti kontestasi pada Pemilukada langsung, sebagai berikut :

2.1.1 Modal Politik

Kandidat dalam pemilukada memerlukan dukungan politik diusung dari partai politik (koalisi partai). Partai politik adalah organisasi politik yang mengajukan kandidat dalam pemilukada dan wakada untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan dan kemudian dipilih oleh rakyat sedangkan Pemilu adalah merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kandidat akan berusaha sebanyak mungkin menggalang koalisi partai politik yang mendapatkan kursi dan suara di DPRD hasil pemilu legislatif, namun dukungan parpol yang

tidak memiliki kursi di DPRD juga tetap digalang. Namun pemilukada dan wakada sebagai arena kompetisi antar kandidat calon kepala daerah yang dicalonkan oleh partai politik (koalisi partai), fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih menonjol terhadap pengaruh figur kandidat.

Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (*symbolic capital*), modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*) maupun modal ekonomi (*economic capital*). Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu (1930-2002), adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (*multiple forms of capital*). Namun Bourdieu sering dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik dalam membangun teorinya. Kecenderungan kurang berpijaknya Bourdieu pada kenyataan empirik yang kemungkinan membuatnya tidak sempat menajamkan uraiannya mengenai modal politik padahal dinamika akumulasi dan penggunaan modal politik memiliki lingkaran pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.⁷

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir (2009) mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik

⁷ Sudirman Nasir, *SBY antara modal politik dan modal simbolik*, dalam <http://pemilu.liputan6.com/kolom>, download tanggal 29 September 2011, pukul 15.00 wib.

yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (public opinion) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu.

Sementara itu modal simbolik atau dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (*respect*) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya⁸

Ahli politik J.A. Booth dan P.B. Richard mengartikan modal politik sebagai aktifitas warga negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. A.Hick dan J.Misra (1993) mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

⁸ *ibid*

Dalam pandangan Foucault (1982), kekuasaan terutama berarti kapasitas untuk melakukan atau menjadi hal-hal tertentu secara paripurna. Kekuasaan dipraktikkan oleh individu atau sekelompok manusia ketika mereka saling berinteraksi. Penggunaan kekuasaan terdapat dalam penetapan aturan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengatur hasil yang mungkin muncul. Dalam sistem otoriter, relasi kekuasaan secara progresif tergovernmentalisasi dalam arti semakin delaborasikan, dirasionalisasikan dan dipusatkan dalam bentuk atau dibawah naungan institusi-institusi negara.⁹

Pemilu merupakan arena untuk melakukan mekanisme sirkulasi elit dalam mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Elit di dalam politik harus memiliki keunggulan-keunggulan. Jika melihat prosentase kandidat yang diusung dan didukung oleh parpol (koalisi partai) baik dari hasil kursi atau hasil suara dari pemilu legislatif masing-masing pasangan kandidat berbeda bahkan ada pasangan kandidat tertentu mendapatkan dukungan suara parpol sangat besar atau lebih dominan. Namun meskipun kandidat yang diusung oleh suara partai lebih besar belum tentu otomatis dapat memenangkan pilkada secara langsung, karena itu dalam pilkada pengaruh figur lebih besar dan kompetisi antar partai(koalisi parpol) tidak terlalu menonjol. Peran figur kandidat dipandang sangat menentukan karena Pemilukada sebagai arena kontestasi tidak terdapat kontestasi yang kuat antar partai melainkan antar kandidat. Selain dukungan kandidat dari parpol, kandidat juga harus berusaha sebanyak mungkin memperoleh dukungan dari

⁹Philpott, Simon, *Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*, LkiS Yogyakarta, 2003 hal.205

kekuatan-kekuatan non-politik seperti organisasi keagamaan, pemuda, profesi dan lainnya¹⁰.

Dalam konteks lokal (daerah) banyak terdapat elit-elit yang menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerah tersebut. Menurut Nurhasim, dkk Elit politik dalam konteks lokal yaitu :

“Elit Politik Lokal adalah mereka yang memiliki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang ada di tingkat daerah. Elit Non-Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti elit keagamaan, elit organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya”¹¹

Kandidat memerlukan selain dukungan partai politik, juga dukungan elit-elit politik lokal dan elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol dalam politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki calon kepala daerah, dan kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur jabatan di partai politik dan pemerintahan.

Modal politik yaitu dukungan politik berupa dukungan Partai Politik (koalisi partai) dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk kemenangan pilkada.

¹⁰ Haryanto, 2005, *Kekuasaan Elit (suatu bahasan pengantar)*, JIP UGM, hal 72.

¹¹ Nurhasim, Moch, dkk(2003), *Konflik antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Jakarta, hal 8.

4.2.2. Modal Sosial

Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan Modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan¹². Kepercayaan di gunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan. Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan kemenangan pemilukada, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut.

Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial di bagi dalam dua kelompok. Pertama menekankan pada jaringannya hubungan sosial (*social network*), sedangkan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik yang melekat (*embedded*) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial¹³.

¹² *ibid*

¹³ Jamaluddin Ancok, "Modal Sosial, dan Kualitas Masyarakat", Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM Yogyakarta, tanggal 3 Mei 2003.

Sejumlah ahli menyampaikan pandangan berbeda tentang modal sosial tetapi memiliki korelasi seperti diolah Mefi Hermawati yang dapat dicermati sebagai berikut :¹⁴

- a. Robert Putnam (1993) : modal sosial adalah suatu *mutual trust* antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini mengandung pengertian diperlukan ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas. Putman juga melonggarkan makna asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi *desireable outcome* (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcome* (hasil tambahan).
- b. Pierre Bourdieu (1970), mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”. Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk *social capital*

¹⁴ Mefi Hermawati, “Penguatan dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat”, Laporan Need Assesment Pemberdayaan Masyarakat Adat di Nusa Tenggara timur, IRE Yogyakarta, 2002.

(modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu).

- c. James Coleman (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Coleman membagi dua kubu, yaitu sosiologis dan ekonom yang masing-masing berbeda ketika melihat modal sosial sebagai entitas dalam ruang partisipasi publik.
- d. Dari sudut pandang lain, North (1990) dan Olson(1982) menekankan Lingkungan sosial politik sebagai modal sosial. Faktor lingkungan berpengaruh pada peluang bagi norma untuk mengembangkan dan membentuk struktur sosial. Jika pandangan Putnam dan Coleman hanya menekankan pada asosiasi horisontal dan vertikal, North dan Olson menambahkan peran struktur dan hubungan institusional yang lebih formal, seperti pemerintah, rezim politik, hukum, sistem peradilan, serta kebebasan sipil dan politik.

Sementara bahasan mengenai *trust* jadi unsur penting dalam kajian Francis Fukuyama yang terkait dengan kebajikan sosial dan modal sosial. Fukuyama mendefinisikan modal sosial (*social capital*) sebagai serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Fukuyama mengeksplorasi modal sosial guna mendeskripsikan bahwa masyarakat dengan kepercayaan tinggi, dijamin sukses menjalankan visi dan misinya (*high-trust society*). Sebaliknya, sikap saling curiga, suka menaruh kecewa kepada unit masyarakat yang lain, selalu menabung cemburu satu sama lain, adalah indikasi rendahnya kepercayaan (*low-trust society*) di masyarakat. Atau diistilahkan dengan *zero trust society*, ketiadaan kepercayaan. Analoginya adalah ketika seorang calon anggota legislatif terpilih tidak berdasarkan modal sosial berupa kepercayaan yang tinggi, akan kesulitan menjalankan misi politik sehari-harinya.

Modal sosial bagi Fukuyama adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau dibagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar, modal sosial berbeda dengan modal manusia (*human capital*) sejauh ia bisa diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural seperti agama, tradisi atau sejarah.¹⁵

Modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung.

¹⁵Fukuyama, Francis, (terj.Ruslani), *Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, (Penerbit Qalam : Yogyakarta, 2002)

4.2.3. Modal Ekonomi

Dalam pemilu tentu setiap kandidat dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi perlu modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan penggunaan dana politik itu sendiri.

Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang. Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik.

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya.

Para ekonom telah lama berbicara mengenai modal (capital) ini, khususnya modal ekonomi atau finansial (financial capital). Modal financial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat-alat produksi perusahaan (misalnya pabrik, mesin, alat kantor, kendaraan) atau sejumlah uang yang dapat dikumpul atau ditabung untuk investasi di masa depan. Konsep modal seperti ini relatif mudah dipahami oleh orang awam sekalipun, karena membelanjakan atau menginvestasikan uang merupakan bagian kehidupan

sehari-hari manusia dan melibatkan pemikiran yang jelas. Modal financial juga mudah untuk diukur. Uang dapat dihitung, karena jumlah uang yang dibelanjakan dapat diidentifikasi dengan barang yang dibeli¹⁶.

Ahli ekonomi John Stuart Mill dalam *Principle of Political Economy* (1848) seperti dikutip Augusto Bunga (2008), menggunakan istilah “*capital*” dengan arti : (1) barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dan (2) suatu dana yang tersedia untuk mengupah buruh. Pada akhir abad ke-19, modalitas dalam artian barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dipandang sebagai salah satu di antara empat faktor utama produksi (tiga lainnya adalah tanah, tenaga kerja dan organisasi atau manajemen). Para ahli ekonomi neo-klasik menggunakan pandangan ini (misalnya Alfred Marshall dalam *Principles of Political Economies* 1890). Modal dalam konteks ekonomi seringkali dipadankan dengan pemikiran tentang kapitalisme dengan segala kontroversinya.¹⁷

Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang pendek) antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju Pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional.

¹⁶ Edi,Suharto.Phd,http://MODAL_SOSIAL_DAN_KEBIJAKAN_SOSIAL.pdf, download tanggal 9 September 2011, pukul 10.30 wib.

¹⁷ Bunga, Augusto,*op.cit*.<http://rumahdesainrevolusi.blogspot.com>.

Pilihan publik dalam pemilihan umum pada perspektif politik dan ekonomi adalah proses dimana preference individu dikombinasikan ke dalam keputusan kolektif. Perbedaannya dalam perspektif politik, maka dalam perspektif ekonomi, konsep pilihan publik dalam pemilihan umum merupakan transformasi dari ekonomi klasik yang secara sederhana digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel.2.1 Perspektif Ekonomi Politik Pilihan Publik, Didik J, Rachbini, 2002 ¹⁸

Variabel	Perspektif Ekonomi	Perspektif Politik
Supplier	Produsen, Pengusaha, Distributor	Politisi, Parpol, Birokrasi, Pemerintah
Demander	Konsumen	Pemilih (voters)
Jenis Barang	Barang Individu (private goods)	Barang Publik (public goods)
Alat transaksi	Uang	Suara (voters)
Jenis Transaksi	Voluntary transaction (sukarela)	Suara (voters) Political exchange

Kandidat memerlukan dukungan ekonomi selain dari kandidat juga berasal dari aktor-aktor ekonomi untuk kemenangan pilkada dalam pembiayaan semua kegiatan politik kandidat. Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa Proses politik pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Hal ini menyebabkan tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal, karena kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang/modal yang besar. Mahalnya ongkos pilkada dapat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu :¹⁹

1. Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung diharuskan membeli partai politik sebagai kendaraan politik. Partai politik yang

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Lihat Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin, *ibid*, hal. 120-121

akan dijadikan kendaraan dalam pilkada mengharuskan pasangan calon untuk menyetor dana sumbangan hingga miliaran rupiah.

2. Model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon membutuhkan banyak biaya. Misalnya, buat poster, pemasangan iklan di media massa baik cetak maupun elektronika.
3. Untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek politik uang. Model pemberian uang kepada pemilih biasanya dilakukan hampir pada setiap proses pentahapan pilkada. Peredaran uang yang paling menonjol pada saat kampanye pasangan kandidat dan menjelang pemungutan suara.

Ditambahkan Sahdan dan Haboddin, bahwa setiap penyelenggaraan pilkada membutuhkan “dana politik” untuk biaya kegiatan pilkada. Istilah dana politik dapat dibedakan dengan melihat sumber dan penggunaan, yaitu :²⁰

1. Dilihat dari sumbernya, dana politik berasal dari sumbangan pasangan calon dan sumbangan dari para simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan. Dana politik juga bisa diartikan sebagai wujud konkrit dari partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah.
2. Dari sisi pengguna, dana politik dibedakan berdasarkan bentuk peruntukannya menjadi pengeluaran untuk membiayai aktivitas rutin partai politik dan pengeluaran kampanye. Dalam konteks pilkada penggunaan dana politik dilakukan oleh calon pasangan tidak hanya untuk pengeluaran kampanye dalam bentuk mencetak brosur, konvoi, biaya transportasi, biaya konsumsi, cetak kaos, poster dan iklan. Tetapi juga mengenai pengeluaran pasangan calon untuk bayar partai politik yang akan dijadikan kendaraan politik, dan membeli suara masyarakat.

²⁰Lihat Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin, *ibid*, hal. 124-125

Berikut adalah alur bagaimana politik uang dilakukan dan siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya :

Bagan Dana Politik²¹



Bagan di atas menunjukkan bahwa dana politik kandidat bersumber dari dana pribadi dan Penyumbang dari simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan dan dana politik berdasarkan penggunaannya dipergunakan untuk bayar partai, kampanye dan beli suara. Pengeluaran biaya sangat besar dimungkinkan dalam sistem pilkada, mengingat arena kontestasi yang sangat terbuka dan kompetitif apalagi pemilih ditempatkan sebagai penentu apakah pasangan dipilih/tidak dipilih yang terpengaruh oleh besarnya dana politik kandidat. Hal inilah yang membuat kandidat dan proses pilkada mengakibatkan dana politik yang sangat mahal, karena pelaksanaan pilkada sejak persiapan hingga kampanye, mobilisasi dan keperluan *cost politik* lainnya oleh kandidat mempunyai pengaruh terhadap biaya yang diperlukan berdasarkan

²¹ Lihat Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin, *ibid*, hal. 126

penggunaannya dan besarnya modalitas kandidat terkadang menjadi alasan parpol mengusung kandidat dan mengambil keuntungan dari kekuatan modalitas kandidat.

Modal Ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan berdasarkan penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye dan beli suara, untuk kemenangan pilkada.

2.2 Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :

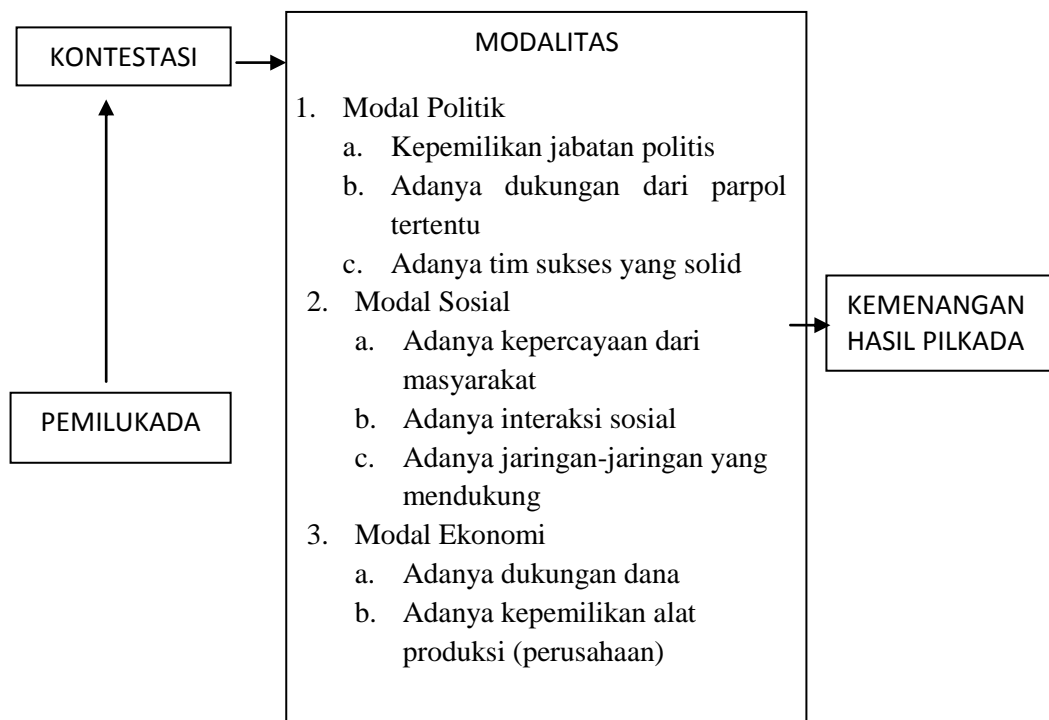
1. Modalitas dalam Kontestasi Politik adalah modalitas selain peran figur, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, elit-elit/aktor-aktor sosial politik dan ekonomi untuk kemenangan pilkada.
2. Modal politik yaitu dukungan politik berupa kepemilikan jabatan-jabatan politis serta dukungan Partai Politik (koalisi partai) dan adanya tim sukses yang solid.
3. Modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung.
4. Modal Ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan berdasarkan penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye untuk kemenangan pilkada.

2.3 Definisi Operasional

Adapun operasionalisasi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Modal Politik
 - a. Kepemilikan jabatan politis
 - b. Adanya dukungan dari parpol tertentu
 - c. Adanya tim sukses yang solid
2. Modalitas Sosial
 - a. Adanya kepercayaan dari masyarakat
 - b. Adanya interaksi sosial
 - c. Adanya jaringan-jaringan yang mendukung
3. Modal Ekonomi
 - a. Adanya dukungan dana
 - b. Adanya kepemilikan alat produksi (perusahaan)

2.4 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif . Tipe dan pendekatan tersebut digunakan sebagai suatu proses dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Pengertian kualitatif yaitu dimaksudkan untuk memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, tindakan dengan cara dekripsi berupa teks, gambar, kata-kata dan bahasa yang diungkap dan ditemukan dalam penelitian ini. Data tersebut bisa berasal dari wawancara, catatan, video, dan dokumen.

Peneliti akan mendeskripsikan penelitian ini karena berdasarkan topik atau tema yaitu mengenai peran modalitas dalam pemenangan pemilukada. Adapun variabel topik penelitian tersebut yaitu peran modalitas pada pemenangan pemilukada. Deskripsi penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang peran modalitas dalam kemenangan pemilukada. Modalitas politik yaitu dukungan partai politik modalitas sosial yaitu, kepercayaan masyarakat dan jaringan-jaringan masyarakat. modalitas ekonomi yaitu dukungan dana dan alat produksi (perusahaan)

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi (tempat) di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

3.3 Metode Penentuan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *snowballing*. Cara memperoleh informan dengan teknik ini yang pertama adalah menemukan *gatekeeper* yang paham tentang objek penelitian dan dapat membantu penulis selama penelitian, sekaligus menjadi orang pertama yang diwawancarai, setelah itu dapat memberikan informasi atau informan lain yang lebih paham dan dapat diwawancarai untuk melengkapi informasi yang telah didapat.

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif, maka penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in-dep interview*) dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka dimana informan mengetahui kehadiran penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara di lokasi penelitian dan dalam melakukan wawancara dengan para informan penulis menggunakan alat rekam sebagai alat bantu. Adapun informan yang akan diwawancarai adalah :

1. Pasangan Hanny – Maxsimiliaan
2. Ketua/ pengurus Partai Pendukung
3. Ketua/ pengurus Tim Sukses
4. Relasi dari pasangan Hanny - Maxsimiliaan
5. Pihak-pihak yang dianggap memiliki banyak informasi fokus penelitian yang dilakukan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dari berbagai metode pengumpulan data yang ada, studi ini menggunakan metode kombinasi yang bersandar pada wawancara mendalam, dokumen tertulis dan observasi. Penulis memilih menggabungkan ketiga metode tersebut untuk bisa saling melengkapi.

- a. Wawancara mendalam (*depth interview*) yaitu data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan secara langsung dengan informan yaitu kandidat Hanny Sondakh- Maximilliaan Lomban, Tim Pemenangan dan Relawan, dan Pengurus Partai pengusung pasangan Hanny Sondakh- Maximilliaan Lomban. Hasil wawancara diharapkan dapat memberikan informasi berdasarkan topik penelitian ini mengenai modalitas dan strategi pemenangan pemilukada.
- b. Dokumentasi yaitu data-data tertulis dan dokumen penting lainnya yang menunjang penelitian, data bersumber dari kandidat Hanny Sondakh- Maximilliaan Lomban, Sekretariat Tim Pemenangan dan Relawan pasangan Hanny Sondakh- Maximilliaan Lomban, KPU Kota Bitung, dan instansi Pemerintah yang berkaitan penelitian ini. Dokumen yang diperlukan penelitian ini yaitu, profil kandidat, surat pernyataan dukungan dari partai pengusung, rekapitulasi suara dan kursi partai pendukung pasangan Hanny Sondakh- Maximilliaan Lomban, dan dokumen lainnya selama masih berkaitan dengan fokus penelitian.

- c. Observasi yaitu teknik observasi digunakan karena memungkinkan peneliti mengamati dari dekat dinamika kepercayaan masyarakat dan jaringan serta kepemilikan sarana produksi. Dengan pengamatan langsung akan dapat ditemukan hal-hal yang melengkapi hasil wawancara.

3.5 Jenis Data

Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang unit penelitian maka jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yakni data atau keterangan yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari orang-orang yang diteliti yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari informan.
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui buku, dokumen tertulis atau literatur lainnya yang relevan berkaitan dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah *grounded research* atau teknik perbandingan tetap²². Secara umum, tahapannya sebagai berikut: (1) Reduksi data; yaitu berupa penyajian hasil data secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara, dokumentasi maupun catatan observasi di lapangan, untuk diidentifikasi yang memiliki makna yang berkaitan dengan masalah penelitian dan membuat koding. (2) Kategorisasi, yaitu memilih data mentah yang

²²Disebut sebagai metode perbandingan tetap (*constant comparative method*) karena dalam analisis data, secara tetap membandingkan suatu datum dengan datum yang lain, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori yang lainnya. Lexy J.Moleong , *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hal. 288

masih beragam untuk dikelompokkan dalam pokok-pokok persoalan, penyusunan ke dalam satuan-satuan atau kategorisasi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan data, yaitu upaya menentukan data yang masuk memenuhi syarat penelitian atau belum, sehingga kalau belum maka dapat disempurnakan, (3) *Sintesisasi*, yaitu mencari kaitanantara satu kategori dengan kategori yang lainnya. dan (4) Menyusun generalisasi/hipotesis kerja untuk analisis dan penafsiran data berdasarkan teori dan konsep yang digunakan untuk mengambil kesimpulan.

Untuk menganalisa keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan *triangulasi* yaitu, tehnik pemeriksaan data yang mementingkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu²³. Karena penelitian ini menggunakan *triangulasi* dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dialam metode kualitatif. Hasil analisa data diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian.

²³Moleong J. L. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. hlm. 178

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. S, Ubed, 2002, *Politik Identitas Etnis, Pergaulan Tanda Tanpa Identitas, Indonesiatara*, Magelang.
- Ancok, Jamaluddin, “*Modal Sosial, dan Kualitas Masyarakat*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, PT. Gramedia , Jakarta.
- Fukuyama, Francis, (terj.Ruslani), 2002, *Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam : Yogyakarta.
- Harris Jhon, Kristian Stokke, dan Olle Tornquist,2005, *Pendahuluan : Politik Demokrasi Lokal Baru*, Demos, Jakarta
- Haryanto, 2005, *Kekuasaan Elit (suatu bahasan pengantar)*, JIP UGM, Yogyakarta
- Haryatmoko, *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa : Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu*. Dalam majala BASIS Edisi Khusus Pierre Bourdieu, (Edisi November-Desember 2003)
- Huntington. P.Samuel, 2003, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. (edisi terjemahan).
- Kotler, 2003, *Perilaku Dan Komunikasi Pemasaran*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong J. L. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda karya, Bandung
- Marijan Kacung, 2006, *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, Pustaka Eureka, Surabaya.
- Mefi Hermawanti, “*Penguatan dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat*”, Laporan Need Assesment Pemberdayaan Masyarakat Adat di Nusa Tenggara timur, IRE Yogyakarta, 2002.

Nurhasim, Moch, dkk, 2003, *Konflik antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta.

Philpott, Simon, 2003, *Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*, LkiS Yogyakarta.

Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin (editor), 2009, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia*, IPD, Yogyakarta

Sumber lain :

Internet :

Berita Manado: *pleno KPU Kota Bitung*, dalam <http://beritamanado.com/kota-bitung-2/pleno-kpu-bitung-sondakh-lomban-5350-persen/18996/>, download tanggal 13 november 2011, pukul 20.30 wib.

Bunga, Agosto, *Sekilas tentang pengertian modal*, dalam <http://rumahdesain-revolusi.blogspot.com>. download 23 Juli 2011, pukul 13.30 wib.

Biyanto, *Kiprah Ormas dalam pilkada*, http://www.sunanampel.ac.id/ar/images/stories/pdf_files/kiprah%20ormas%20dalam%20pilkada%20biyanto%20februari%202010.pdf, download 26 Maret 2012, pukul 10.00 wib.

Edi, Suharto. Phd, http://MODAL_SOSIAL_DAN_KEBIJAKAN_SOSIAL.pdf. download 20 November 2011, pukul 10.30 wib.

Sudirman Nasir, *SBY antara modal politik dan modal simbolik*, dalam <http://pemilu.liputan6.com/kolom>. diakses 29 September 2011, pukul 15.00 wib.

Perundang-undangan :

Keputusan KPU Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 Tentang Penetapan Hari, Tanggal Dan Bulan Pemungutan Suara Pemilihan

Umum Walikota Dan Wakil Walikota, Kota Bitung Tahun 2010.

Undang-undang Republik Indonesia NO.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.